



► Studi kelayakan

Kebutuhan operasional untuk Indonesia

John Carter, Ahli asuransi kerja

Ippei Tsuruga, Project Manager, Proyek ILO-Fast Retailing

Instansi Utama yang terlibat dalam pelaksanaan skema asuransi kerja di Indonesia

1. BPJS Ketenagakerjaan:

- Pendaftaran pemberi kerja untuk pengumpulan iuran AK;
- Pengumpulan iuran untuk pemberi kerja dan pekerja;
- Surat pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja ke pekerja kepada BPJS (Hubungan Industrial juga mensyaratkan surat pemutusan hubungan kerja juga (berintegrasi?));
- Menerima permohonan manfaat AK; memproses permohonan dan membayar manfaat AK jika pekerja berhak;
- Keberlanjutan klaim: membuat keputusan tentang kesiapan dan kemampuan misalnya penolakan terhadap pekerjaan yang sesuai atau berhenti mengikuti kursus pelatihan;

▶ Instansi Utama yang terlibat dalam pelaksanaan skema asuransi kerja di Indonesia (lanjutan)

2. Kementerian Ketenagakerjaan:

Jamsos (Direktorat Jaminan Sosial/Perlindungan Sosial): bertanggung-jawab atas kepemimpinan dan pengawasan skema AK termasuk pemantauan berkelanjutan dan tanggung-jawab keseluruhan;

Direktur Jenderal Hubungan Industrial: terlibat dalam perekrutan dan pemberhentian pekerja dan mencakup proses Penyelesaian Sengketa HI;

Binapenta (Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja): terlibat dalam instrumen ketenagakerjaan yang disebut Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif misalnya layanan pencocokan pekerjaan, informasi pasar kerja, resume dan lokakarya pencarian kerja serta bursa kerja; tugas baru: mendaftarkan pekerja yang diberhentikan untuk pekerjaan dan melakukan wawancara kerja pencarian pekerjaan bulanan secara berkelanjutan.

► Instansi Utama yang terlibat dalam pelaksanaan skema asuransi kerja di Indonesia (lanjutan)

2. Kementerian Ketenagakerjaan (lanjutan):

Binalattas (Dirjen Pelatihan): bertanggung-jawab atas standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja; pengembangan pusat pelatihan; pengembangan instruktur dan tenaga pelatihan; pengembangan pemagangan; tugas baru: seleksi dan rujukan pekerja menganggur potensial untuk pelatihan (kemitraan erat antara Binapenta dan Binalattas);

Barenbang (Badan Perencanaan dan Pengembangan): memiliki tugas memberikan dukungan perencanaan tenaga kerja, pengelolaan data dan informasi serta kepala Pusat Teknologi Informasi.

▶ Prakarsa Satu Jendela

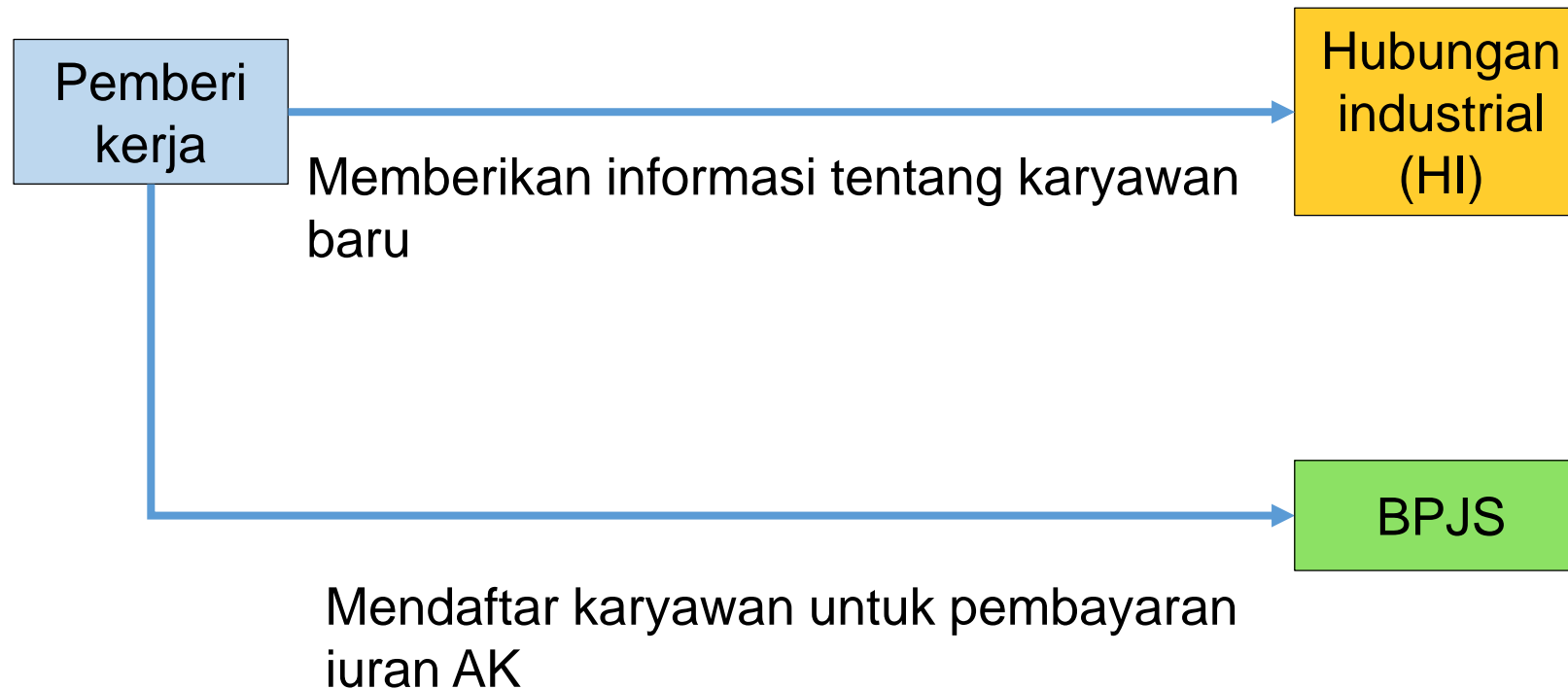
Prakarsa satu jendela akan menyatukan dua departemen utama yang bertanggung-jawab atas pengurusan klaim AK dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif yaitu: BPJS dan Kementerian Ketenagakerjaan; dapat dicapai dengan penyatuan lokasi jaringan kantor (misalnya staf Ketenagakerjaan di kantor BPJS untuk memberikan layanan efektif kepada pekerja menganggur – layanan satu pintu untuk pendaftaran pekerjaan dan pengurusan klaim manfaat AK dan berkonsultasi tentang potensi pelatihan pekerja menganggur);

Banyak negara memungkinkan penganggur mendapatkan layanan-layanan penting ini di satu lokasi sehingga meningkatkan pengalaman layanan klien dan mengurangi waktu perjalanan antar kantor.

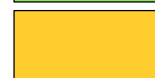
▶ Alur operasional

- Dalam slide, kami mengilustrasikan alur operasional dalam bagan singkat yang dilanjutkan dengan tabel rinci.
- Kami berupaya menghubungkan operasional saat ini yang dijalankan oleh instansi-instansi yang ada dalam diagram alir. Sementara itu, kami menambahkan dalam kotak biru isu-isu kunci yang harus dipertimbangkan untuk membuat operasional menjadi lebih efektif.
- Warna dalam bagan merepresentasikan lokasi fisik atau instansi. Misalnya, dinas ketenagakerjaan setempat memiliki unit hubungan industrial, layanan ketenagakerjaan publik, pelatihan vokasi, dll.; dan oleh karena itu, ketiga unit ini diilustrasikan dalam kotak kuning.

Merekrut karyawan



 Kantor BPJS

 Dinas Ketenagakerjaan setempat

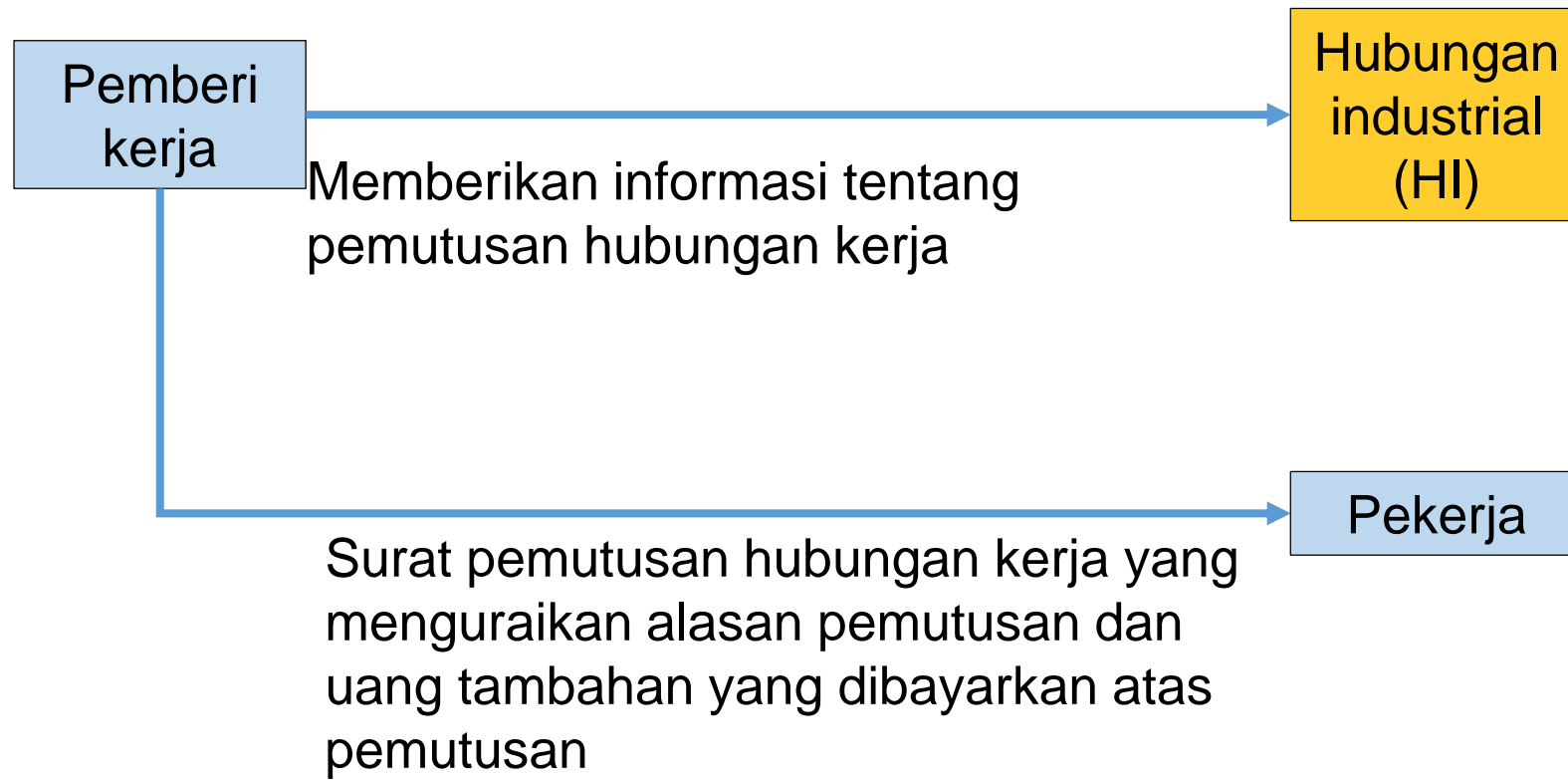
Pertimbangan

Informasi/pangkalan data karyawan terdaftar yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dimiliki bersama/diintegrasikan guna meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan/jaminan sosial terkait kepatuhan.

► Merekrut karyawan

Alur operasional / Instansi	Pekerja	Pemberi kerja	BPJS	Kemnaker Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota		
				Hubungan Industrial	LKP	Pelatihan
Saat memulai usaha dan merekrut pekerja (Masalah ketenagakerjaan)						
Mendaftar pemberi kerja untuk merekrut pekerja (untuk pertama kali saja)		Menyerahkan		Menerima		
Menginformasikan tentang karyawan baru (setiap kali merekrut)		Menyerahkan		Menerima		
Pendaftaran pemberi kerja dan pengumpulan iuran AK						
Mendaftar pemberi kerja untuk pengumpulan iuran (untuk pertama kali saja)		Menyerahkan	Menerima			
Mendaftar karyawan untuk membayar iuran (setiap kali merekrut)		Menyerahkan	Menerima			
Mengumpulkan iuran dari pemberi kerja atas nama karyawan dan pemberi kerja		Membayar	Menerima			

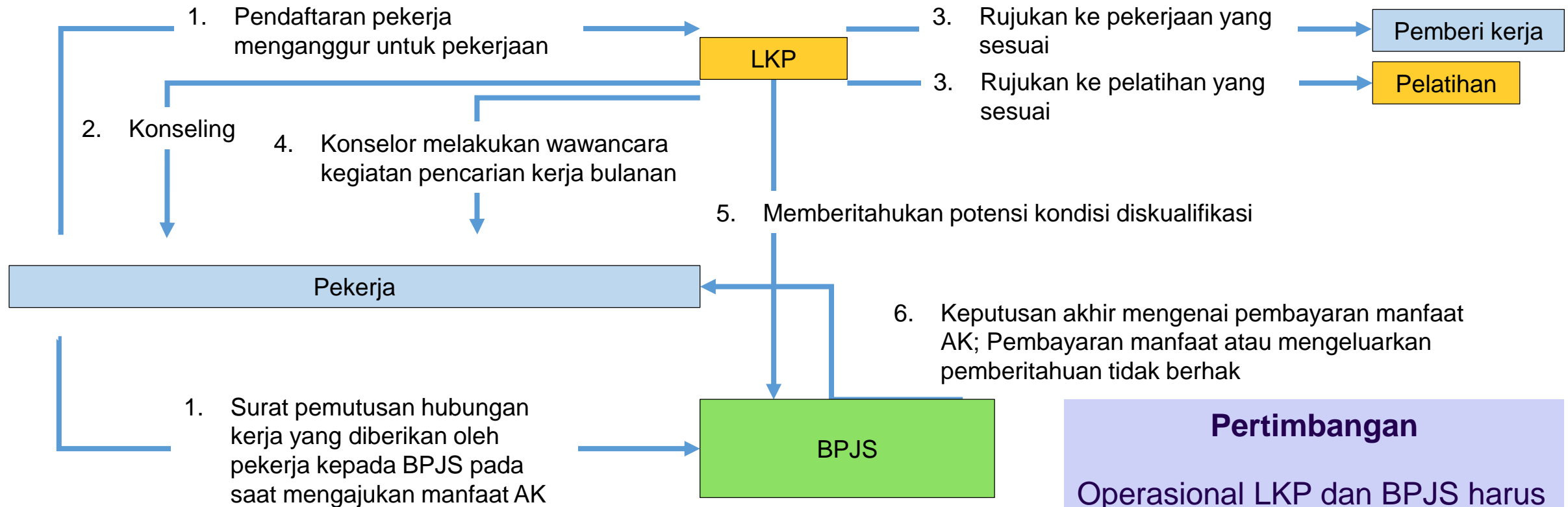
Memutus hubungan kerja



Pertimbangan

Kemnaker dan BPJS harus menyepakati template untuk surat pemutusan hubungan kerja termasuk semua informasi yang diperlukan untuk operasional mereka. Terdapat juga masalah orang yang berhenti di mana HI tidak mensyaratkan kelengkapan surat pemutusan hubungan kerja tetapi BPJS pasti membutuhkannya.

Mengajukan manfaat AK



Kantor BPJS



Dinas Ketenagakerjaan setempat

Pertimbangan

Operasional LKP dan BPJS harus diselesaikan di kantor yang sama (layanan satu jendela).

Memutus hubungan kerja dan mengajukan manfaat AK

Alur operasional / Instansi	Pekerja	Pemberi kerja	BPJS	Kemnaker Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota		
				Hubungan Industrial	LKP	Pelatihan
Saat Memutus hubungan kerja dan mengajukan manfaat AK						
Pemberi kerja memberi pekerja menganggur surat pemutusan hubungan kerja yang menguraikan alasan pemutusan dan uang tambahan yang dibayarkan atas pemutusan, sekaligus memberi tembusan kepada dinas ketenagakerjaan setempat	Menerima	Menyerahkan		Tembusan		
Pendaftaran pekerja menganggur untuk pekerjaan di kantor LKP	Mendaftar				Melakukan	
Surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh pekerja kepada BPJS pada saat mengajukan manfaat	Menyerahkan		Menerima			
Mengajukan manfaat AK di kantor BPJS dan mengisi formulir pengajuan AK (layanan depan)	Menyerahkan		Menerima			
Mendaftar pengajuan AK dan membuat berkas pengajuan			Mendaftar			
Meninjau dan menilai pengajuan AK			Meninjau			
Membuat keputusan akhir tentang pembayaran manfaat AK (atau mengeluarkan pemberitahuan tidak berhak)			Menyetujui			
Pembayaran manfaat (bank atau tunai)	Menerima		Membayar			

Memutus hubungan kerja dan mengajukan manfaat AK

Alur operasional / Instansi	Pekerja	Pemberi kerja	BPJS	Kemnaker Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota		
				Hubungan Industrial	LKP	Pelatihan
Kelanjutan pembayaran manfaat secara bulanan						
Melakukan pertemuan bulanan wajib untuk kegiatan pencarian kerja	Menghadiri				Melakukan	
Konselor dapat melakukan wawancara					Melakukan	
Memberikan konseling dan kemungkinan rujukan ke pekerjaan dan/atau pelatihan yang sesuai		Merekrut			merujuk	Melatih
Memberitahukan kepada BPJS tentang adanya kondisi diskualifikasi			Menerima		Memberitahukan	

► Potensi Risiko terhadap pelaksanaan skema asuransi kerja baru di Indonesia

Laporan kelayakan ini fokus pada risiko operasional yang terkait dengan pelaksanaan skema asuransi kerja, tetapi perlu diketahui bahwa terdapat banyak bentuk risiko “skema” yang tidak dicakup secara eksplisit oleh laporan ini; namun, dalam analisis manajemen risiko skema yang luas, semua risiko skema harus dicakup.

1. Pandemi COVID-19 (tingkat risiko tinggi);
2. Populasi dan Geografi Indonesia (tingkat risiko sedang);
3. Desentralisasi lembaga pemerintah (tingkat risiko tinggi);

► Potensi Risiko terhadap pelaksanaan skema asuransi kerja baru di Indonesia (continued)

4. Surat pemutusan hubungan kerja (tingkat risiko tinggi);
5. Fungsi administrasi baru untuk pekerjaan (tingkat risiko tinggi);
6. Kompatibilitas Sistem TI antara Kemnaker dan BPJS (tingkat risiko tinggi).

Ilustrasi rencana pelaksanaan generik untuk Indonesia

Tahap	Bidang Kerja	Tanggal Penting
	Pemerintah meresmikan pembentukan skema AK baru untuk Indonesia	5 Oktober 2020
Tahap Satu	Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Nasional	
	Membentuk Badan Administrasi Dana AK	
	Persyaratan hukum	
	Jaringan kantor	
Tahap Dua	Sistem TI untuk pengumpulan iuran	
	Manual Prosedur	
	Strategi Komunikasi untuk pengumpulan iuran	
	Perekrutan untuk pengumpulan iuran	
	Pelatihan untuk pengumpulan iuran	
	Tanggal Mulai Berlaku untuk pengumpulan iuran AK	1 Maret 2021 atau 1 April 2021
Tahap Tiga	Membentuk Hotline ke kantor pusat untuk kantor daerah untuk menangani masalah dalam pelaksanaan	
	Sistem TI untuk penghitungan an pembayaran manfaat AK	
	Strategi Komunikasi untuk pelaksanaan dan manfaat	
	Perekrutan dan pelatihan untuk penghitungan dan pembayaran manfaat	
	Tanggal pelaksanaan untuk pekerja menganggur mengajukan permohonan manfaat AK dan menerima manfaat AK	1 Maret 2022 atau 1 April 2022
Tahap Empat	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema AK baru di bulan pertama pengurusan klaim AK	
	Laporan bulanan pengelolaan pengurusan permohonan manfaat AK	
	Pelatihan berlanjut	
	Komunikaksi berlanjut	
	Evaluasi penuh skema AK baru 3 hingga 6 bulan setelah pelaksanaan skema AK	1 Juli 2022 atau 1 Oktober 2022



▶ TERIMA KASIH

Catatan ini disusun oleh Ippei Tsuruga dan John Carter sebagai bagian dari Proyek ILO-UNIQLO on Unemployment Protection in Indonesia – Quality Assistance for Workers Affected by Labour Adjustments, yang didanai oleh Fast Retailing Co., Ltd. Silahkan hubungi Ippei Tsuruga (tsuruga@ilo.org) atau Christianus Panjaitan (christianus@ilo.org) untuk informasi lebih rinci.